



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur sepanjang tahun 2024 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021–2026 maupun RPJMD Tahun 2021–2026.

Selain itu, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan KESBANGPOL Tahun 2024.

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Badan KESBANGPOL secara umum target yang ditetapkan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang. Sehingga amanah nasional yang

kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan rekomendasi izin kegiatan dan pelayanan penerbitan surat keterangan kepada Lembaga atau kelompok organisasi kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur melakukan beberapa hal antara lain :

- Memastikan pelaksanaan pelayanan termasuk front office menerapkan budaya BerAKHLAK;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Akhir kata, saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada seluruh aparatur sipil negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat di tahun-tahun mendatang.

Malili, 20 Februari 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710502 199208 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Luwu Timur, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun yaitu : Pertama : *Meningkatnya Peran FKUB dan Membangun Kerukunan Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya*; Kedua : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD*. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran *Pertama adalah Tercipnya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis*; *Kedua : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum*; *Ketiga : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD*. Dari 3 (tiga) sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja.

Program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2021–2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini

masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Luwu Timur.

Ringkasan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

❖ Sasaran 1 “Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis” dengan indikatornya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Terealisasi 80.47% dari 79.46% target dengan capaian kinerja 101.27%. Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program yang mendukung sasaran strategis 1, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator kinerja persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan, dari target 100% terealisasi 80% dan capaian kinerja 80%. Tidak mencapai target dikarenakan adanya efisiensi anggaran di tahun 2024.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan indikator kinerja jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya, dari target 100% terealisasi 100% dan capaian kinerja 100%
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Dengan indikator persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social, dari target 100%, terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%

❖ Sasaran Strategis -2

Sasaran 2 “Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum” dengan indikatornya kinerja Tingkat partisipasi politik Masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal. Terealisasi 82.39% dari 81% target dengan capaian

kinerja 101.71%. Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program yang mendukung sasaran strategis 2, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Dengan indikator kinerja yaitu persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan politik melalui Pendidikan politik dan pengembangan serta budaya politik. Terealisasi 100% dari target 100% atau capaian kinerja 100%.
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan indikator kinerja persentase jumlah ormas yang diawasi dan diberdayakan. Target 100% terealisasi 106% atau capaian kinerja 106%

❖ Sasaran strategis - 3

Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD” dengan indikatornya Nilai Sakip (n-1). Target yang ditetapkan ditahun 2024 yaitu 77.95 dengan realisasi hasil evaluasi kinerja tahun 2022 yang dilaksanakan ditahun 2023 yaitu 77,95 atau capaian 112,97%. Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program yang mendukung sasaran strategis 3, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan indikator kinerja persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Target kinerja 100%, terealisasi 98,56% dengan capaian kinerja 98,56%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Timur ke depan, sebagai berikut:

1. Keadaan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang plural dan

heterogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial

2. Memaksimalkan peran forum-forum strategis daerah dan organisasi-organisasi keagamaan dalam upaya penguatan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama
3. Masih adanya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Luwu Timur yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini.
4. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.2. Struktur Organisasi	6
1.4.3. Sumber Daya	7
1.4.3.1. Sumber Daya Manusia	7
1.4.3.2. Sarana dan Prasarana	12
1.5. Isu-Isu Strategis	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.1.1. Visi	17
2.1.2. Misi	18
2.1.3. Tujuan dan sasaran	18
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.2. Indikator Kinerja Utama	21
2.3. Strategi program dan kegiatan	21
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.5. Perencanaan Anggaran	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28

3.2.1. Sasaran Strategis I	29
3.2.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun ini	29
3.2.1.2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu	32
3.2.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah	33
3.2.1.4. Perbandingan dengan target nasional	33
3.2.1.5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	34
3.2.1.6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	36
3.2.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	37
3.2.2. Sasaran Strategis 2	48
3.2.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun ini	48
3.2.1.2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu	51
3.2.2.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah	52
3.2.1.4. Perbandingan dengan target nasional	52
3.2.1.5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	53
3.2.2.6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	54

3.2.2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	55
3.2.3. Sasaran Strategi III	66
3.2.3.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun ini	67
3.2.3.2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu	68
3.2.3.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah	69
3.2.3.4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional/daerah lainnya	69
3.2.3.5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	70
3.2.3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	71
3.2.3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran	72
3.2. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	85
4.2. Kesimpulan	85
4.1. Saran	86
Lampiran – Lampiran	
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) Evaluasi LAKIP Tahun 2023	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	6
Gambar 3.1. Dokumentasi Kegiatan “Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan”	40
Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan “Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya”	43
Gambar 3.4. Dokumentasi Kegiatan “Program peningkatan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	46
Gambar 3.5. Dokumentasi Kegiatan “Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	59
Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan “Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2.	Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan kualifikasi pendidikan	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	10
Tabel 1.4	Komposisi PNS/P3K/Upah Jasa berdasarkan penempatan kerja	11
Table 1.5	Daftar sarana dan prasarana kantor	12
Table 1.6	Daftar kendaraan dinas / operasional	12
Table 1.5	Daftar jenis barang dan kondisinya	13
Table 2.1	Hubungan hirarki visi, misi, tujuan dan sasaran ..	19
Table 2.2	Tujuan, sasaran dan arah kebijakan	20
Table 2.3	Indikator kinerja utama	21
Table 2.4	Sasaran strategis, program dan kegiatan	22
Table 2.5	Perjanjian Kinerja 2024	25
Table 2.6	Perjanjian kinerja perubahan 2024	26
Table 2.7	Target belanja APBD Perubahan 2024	27
Table 3.1	Skala nilai peringkat kerja	29
Table 3.2	Realisasi indikator kinerja sasaran-1 tahun 2024	30
Table 3.3	Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun lalu	33
Table 3.4	Target dan Realisasi Tahun 2024 terhadap target jangka menengah	33
Table 3.5	Capaian kinerja dan anggaran sasaran strategis-1 tahun 2024	36
Table 3.6	Efisiensi penggunaan sumber daya	37
Table 3.7	Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	39
Table 3.8	Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	42
Table 3.9	Data konflik dan kejadian	44
Table 3.10	Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada program peningkatan kewaspadaan nasional dan	

	peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	45
Table 3.11	Capaian kinerja sasaran strategis - 2	49
Table 3.12	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak (Pilpres dan Pileg) Tahun 2024	50
Table 3.13	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak (Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2024	50
Table 3.14	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak (Bupati dan Wakil Bupati) Tahun 2024	51
Table 3.15	Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024	51
Table 3.16	Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah	52
Table 3.17	Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2024	54
Table 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran - 2	55
Table 3.19	Daftar Partai Politik dan Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024	56
Table 3.20	Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	57
Table 3.21	Data Ormas/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Rumah Ibadah	60
Table 3.22	Data Ormas/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Rumah Ibadah yang terdaftar dan diawasi 2021 - 2024 ...	65
Table 3.23	Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	65
Table 3.24	Target dan realisasi kinerja sasaran strategis-3	63
Table 3.25	Komponen penilaian kinerja terhadap dokumen LAKIP Kesbangpol	68
Table 3.26	Nilai dan Kategori SAKIP Badan Kesbangpol Tahun 2019 - 2024	68
Table 3.27	Realisasi kinerja terhadap target jangka menengah	69
Table 3.28	Pencapaian kinerja dan anggaran sasaran strategis-3	71
Table 3.29	Efisiensi penggunaan sumber daya	72

Table 3.30	Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	73
Table 3.31	Realisasi anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024 ..	80
Table 3.32	Realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Jenis Kelamin	8
Grafik 1.2. Komposisi SDM (PNS/Upah Jasa) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	9
Grafik 1.3 Jabatan structural berdasarkan jenis kelamin .	10
Grafik 1.4 Komposisi pegawai berdasarkan penempatan kerja	11
Grafik 3.1 Hasil indeks kerukunan umat beragama (IKUB) per kecamatan	30
Grafik 3.2 Hasil indeks kerukunan umat beragama (IKUB) berdasarkan indikator	31
Grafik 3.3 Hasil indeks kerukunan umat beragama (IKUB) berdasarkan indikator	31
Grafik 3.4 Capaian Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021 – 2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan suatu system yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44270);
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.4. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL

1.4.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih

ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social, budaya, agama;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi, kedudukan. Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat; membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama ;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala sub bagian dan para Kepala Bidang sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1
 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
 Berdasarkan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2021



1.4.3. SUMBER DAYA KESBANGPOL

1.4.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 didukung oleh aparat / personil sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri 13 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 (dua) orang pegawai P3K dan 11 (sebelas) orang Non-PNS atau tenaga upah jasa.

Komposisi Pegawai/Upah Jasa tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15 (lima belas) orang perempuan atau 54% dan 13 (sebelas) orang laki-laki atau 46%. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 8% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

A. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Jenis Kelamin

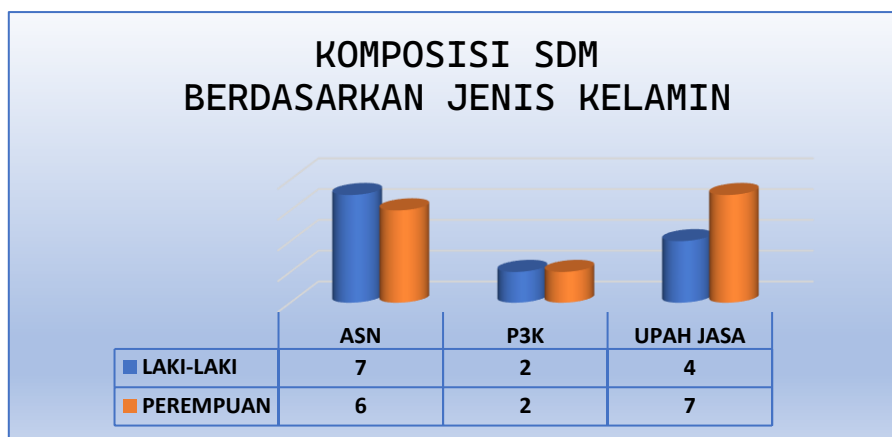
No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A	PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1	Kepala Badan	1 orang		1 orang
2	Sekretaris Badan	1 orang		1 orang
3	Kepala Bidang	–	2 orang	2 orang
4	Kepala Sub Bagian	–	2 orang	2 orang
5	Pelaksana	5 orang	2 orang	7 orang
6	Jabatan Fungsional Tertentu	–	–	–
B	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK(P3K)			
1	Arsiparis		1 Orang	1 Orang

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
2	Pranata Komputer	1 Orang		1 Orang
3	Perencana Ahli Pertama		1 Orang	1 Orang
4	Analisis Sumber Daya Manusia	1 Orang		1 Orang
C	TENAGA HONORER			
1	Tenaga Administratif / Operator	2 Orang	6 Orang	8 Orang
2	Security	1 orang	–	1 orang
3	Sopir	1 orang		1 Orang
4	Cleaning Service	–	1 orang	1 Orang
	Jumlah	13 orang	15 orang	28 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Tahun 2024

Secara grafik dapat digambarkan pada

Grafik 1.1
Komposisi Sumber Daya
Berdasarkan Jenis Kelamin



B. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, komposisi sumber daya manusia disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia (PNS/Upah Jasa)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

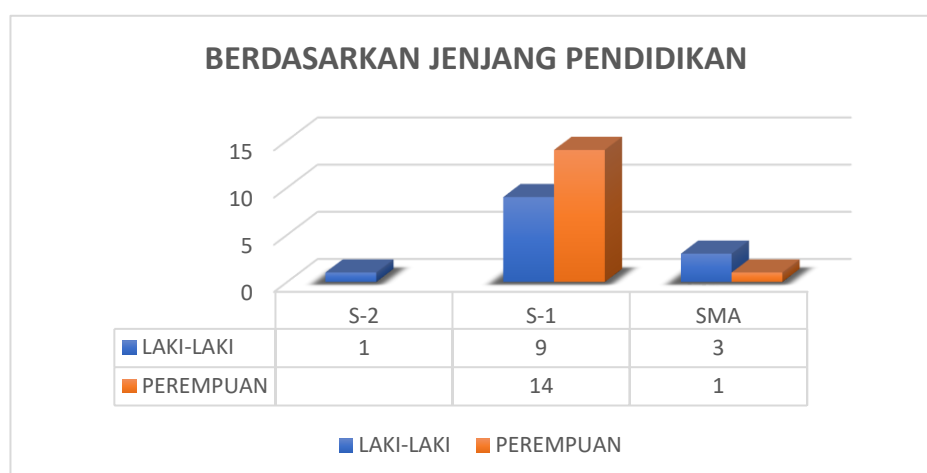
No	Jenis Pendidikan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	0	
A.	PEGAWAI NEGARI SIPIL						
1.	Pasca Sarjana	1	–	–	–	–	1 orang
2.	Sarjana	3	8	–	–	–	11 orang
3.	DIII	–	–	–	–	–	0 orang
4.	SLTA	–	–	1	–	–	1 orang
B.	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K)						
1.	Sarjana	–	4	–	–	–	4 Orang
C.	TENAGA HONORER						
1.	Pasca Sarjana	–	–	–	–	–	–
2.	Sarjana	–	–	–	–	8	8 Orang
3.	DIII					–	–
4.	SLTA					3	3 orang
	JUMLAH	4	12	1	–	11	28 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Tahun 2024

Dari tabel diatas, jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan Tenaga Honorer/Upah Jasa dari segi pendidikan cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdiri tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 4%, S1 sebanyak 23 orang atau 82%, dan SLTA sebanyak 4 orang 14%. Secara grafik dapat digambarkan pada

Grafik 1.2

Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



C. Berdasarkan Jabatan

Selanjutnya komposisi pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural / Eselonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

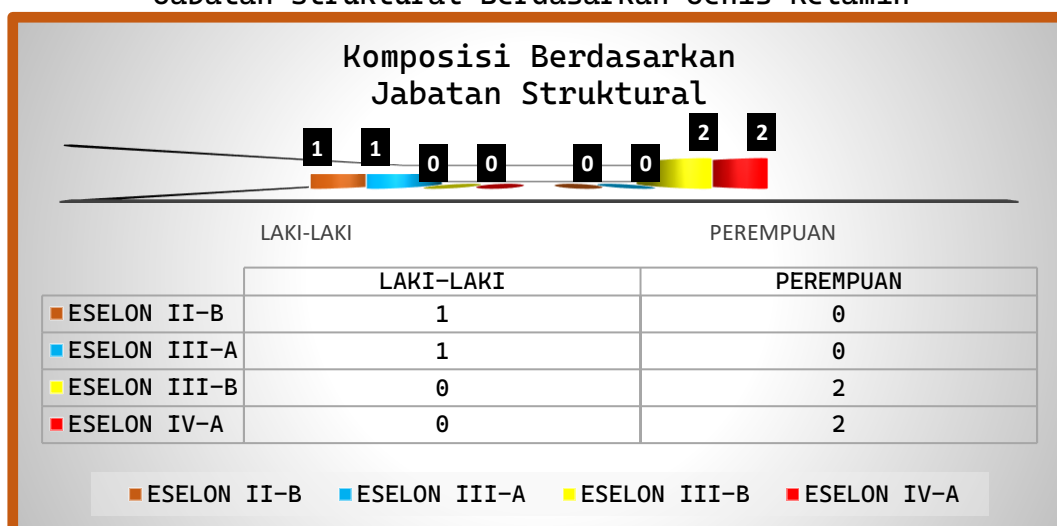
Tabel. 1.3
Komposisi Pegawai
Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No.	Jabatan Struktural / Eselon	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	II b	1	17
2.	III a	1	17
3.	III b	2	33
4.	IV a	2	33
Jumlah		6	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol 2024

Dari data diatas, komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural telah sesuai dengan jumlah jabatan yang ada pada struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu 1 (satu) orang Pejabat Eselon II-B, 1 (satu) orang pejabat eselon III-A, 2 (tiga) orang pejabat eselon III-B dan 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV-A. Untuk jabatan eselon IIIb yang seharusnya sebanyak 3 orang yang menduduki jabatan sesuai dengan struktur organisasi, namun hanya 2 yang jabatan yang terisi, sedangkan 1 jabatan yaitu Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud belum terisi setelah pejabat yang sebelumnya pension. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut

Grafik. 1.3
Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



D. Berdasarkan Penempatan Kerja

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.4.

Komposisi PNS/P3K/Upah Jasa Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang

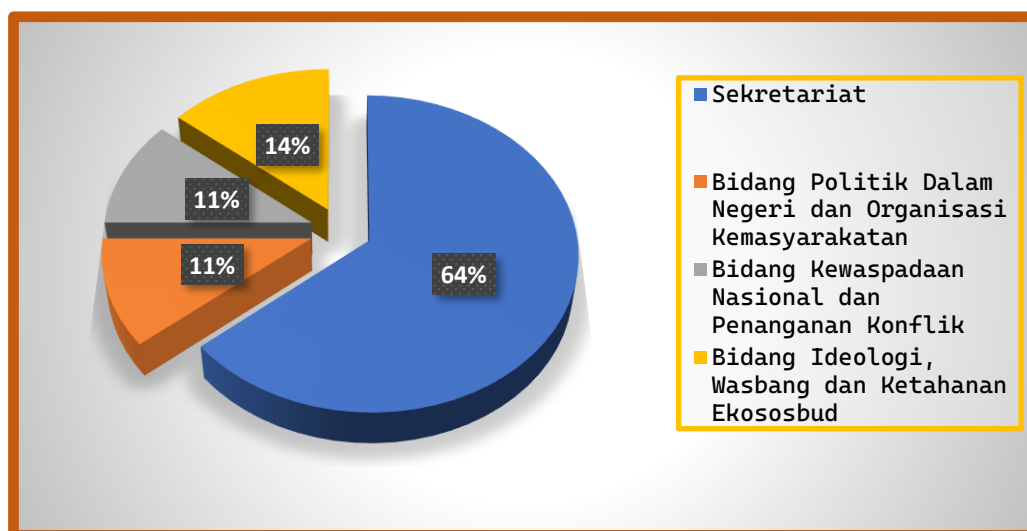
No.	Bidang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Sekretariat	18	64
2.	Bidang Politik Dalam Negeri	3	11
3.	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	3	11
4.	Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud	4	14
Jumlah		28	100

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol 2024

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 64% PNS/P3K/Upah Jasa berada di sekretariat, sedangkan sisanya pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik. 1.4

Komposisi Pegawai (PNS/P3K/Upah Jasa) Berdasarkan Penempatan Kerja



1.4.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kondisi sarana dan prasarana kerja yang sekaligus asset perlengkapan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 1.5
Daftar Sarana/Prasarana Kantor dan Kondisinya
Per 31 Desember 2024

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Ruang Kepala Badan	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Ruang Sekretaris	1 Unit	Kondisi Baik
4.	Ruang Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 Unit	Kondisi Baik
5.	Ruang Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Ruang Kabid Ideologi, Wasbang dan Ketahanan EKOSOSBUD	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Ruang Kasubag REN-KEU	1 Unit	Kondisi Baik
8.	Ruang Kasubag UM-PEG	1 Unit	Kondisi Baik
9.	Ruang/Aula Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
10.	Kamar Kecil (WC)	4 Unit	Kondisi Baik
11.	Ruang Dapur	1 Unit	Kondisi Baik
12.	Ruang Tamu (Front Office)	1 Unit	Kondisi Baik
13.	Gudang	1 Unit	Kondisi Baik
14.	Gedung Kantor FKUB Kab. Luwu Timur	1 Unit	Kondisi Baik

Tabel. 1.6
Daftar Kendaraan Dinas/Operasional dan Kondisinya
Per 31 Desember 2024

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Motor	3 Unit	Kondisi Baik
	Jumlah	4 Unit	

Tabel. 1.7
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Lemari	6	2	8 Unit
2	Scanner	1	–	1 Unit
3	Mesin Ketik Manual	–	4	4 Unit
4	Lemari Arsip/Lemari Besi	2	–	2 Unit
5	Lemari Kayu	4	1	5 Unit
6	Rak Kayu	–	1	1 Unit
7	Filling Kabinet	7	1	8 Unit
8	Brankas	2	–	2 Unit
9	lemari Kaca	1	–	1 Unit
10	CCTV (camera control television system	8	–	8 Unit
11	Mesin Absensi	–	2	2 Unit
12	Papan Pengumuman	28	3	31 Unit
13	Teralis Kantor / Besi Pengaman	1	–	1 Unit Kantor
14	Meja Kayu	3	–	3 Unit
15	Kursi Tunggu	2	–	2 Unit
16	Meja Rapat	2	–	2 Unit
17	Meja Podium	1	–	1 Unit
18	Meja 1/2 Biro	15	–	15 Unit
19	Kursi Rapat	41	–	41 Unit
20	Kursi Tamu	1	1	2 Unit
21	Kursi Putar	4	2	6 Unit
22	Kursi Lipat	20	–	20 Unit
23	Meja Komputer	3	–	3 Unit
24	Sofa	1	–	1 Unit
25	Mesin Pemotong Rumput	2	–	2 Unit
26	Lemari Es / Kulkas	2	–	2 Unit
27	AC (Air Conditioner)	10	1	11 Unit

No	Jenis Barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
28	Kipas Angin	3	2	5 Unit
29	Televisi	2	–	2 Unit
30	Sound System	1	–	1 Unit
31	Wireless	2	–	2 Unit
32	Camera	2	1	3 Unit
33	Tangga Aluminium	1	–	1 Unit
34	Dispenser	1	1	2 Unit
35	Handy cam	–	1	1 Unit
36	Gordyin Kantor	1	–	1 Kantor
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	–	1 Unit
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	–	3 Unit
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	–	2 Unit
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	–	5 Unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	–	2 Unit
42	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	2	3 Unit
43	Tape Recorder	1	1	2 Unit
44	Genset	1	–	1 Unit
45	Komputer	3	3	6 Unit
46	Laptop	17	5	22 Unit
47	Harddisk	1	3	4 Unit
48	Printer	11	7	18 Unit

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Luwu Timur adalah kabupaten yang mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Bantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. Heterogenya masyarakat Kabupaten Luwu Timur, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat;
2. Masih adanya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Luwu Timur yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini;
3. Masih adanya masyarakat yang memilih menjadi ‘golongan putih’ dan tidak berpartisipasi dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi dan Tingkat pendidikan politik Masyarakat yang tidak merata;
4. Rentannya Konflik antar umat beragama di masyarakat yang diakibatkan oleh fanatisme agama dan adanya kelompok – kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat;
5. Masih adanya warga negara asing yang keluar masuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki data yang lengkap;
6. Adanya Lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktivitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Teknologi informasi yang semakin canggih menyebabkan banyaknya berita-berita hoax beredar di masyarakat;
8. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun,

lalu penjelasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dari aspek :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan rencana anggaran yang akan digunakan dan yang anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah dan solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi keluaran (Output) dan hasil out comes/yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mencakup Visi dan Misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1. Visi

Rumusan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana rumusan visi Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur merujuk kepada amanat visi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam kalimat :

V I S I
"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN
NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Visi ini bermakna bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang terus berbenah menjadi lebih maju pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan

budaya didalamnya.

2.1.2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Misi pada nomor (5) dan (6) yaitu

MISI – 5

“MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT”

MISI – 6

” MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA”

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur

VISI RPJMD TAHUN 2021-2026 :			“KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”
MISI – 5 :			“ MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT
MISI – 6 :			“ MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA”
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PD	
1.	Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	1. Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	
		2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	

Sumber: Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan strategi dan kebijakan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur

VISI RPJMD TAHUN 2021-2026 : “ KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”			
MISI – 5 : “ MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT			
MISI – 6 : “ MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	1.Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama.	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan ideologi Pancasila 2. Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 3. Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik.
	2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Meningkatkan pemahaman politik masyarakat	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang politik 2. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	Peningkatan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sumber : Dokumen Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan ikhtisar rencana yang dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Hasil Survey	Persen	75,89	75,92	76	76,34	76,85
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah masyarakat dalam daftar pemilih tetap x 100%	Persen	80,46	80,46	81,00	81,00	81,00

Sumber Data : Dokumen IKU Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

2.3. STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik
			2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip (n-1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 5. Administrasi umum perangkat daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
				6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
				7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
				8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun

2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Pokok
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	79.46
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Persen	81
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	77.95

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.291.192.300,-	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	588.557.460,-	APBD
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.153.046.450,-	APBD
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.734.119.565,-	APBD
5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	58.543.600,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.026.200.184,-	APBD
	Jumlah	37.851.659.559,-	APBD

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Pokok Tahun 2024

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan anggaran, khususnya anggaran hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	79.46
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	Persen	81
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	Nilai	77.95

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.296.215.300,-	APBD-P
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	589.977.460,-	APBD-P
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.507.346.450,-	APBD-P
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	30.816.266.720,-	APBD-P
5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	58.395.600,-	APBD-P
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.657.692.679,-	APBD-P
	Jumlah	38.925.894.208,-	APBD-P

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

2.5. PERENCANAAN ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 37.851.659.559 dengan rincian belanja operasi Rp 136.568.774.559 dan belanja modal Rp 1.173.325.000 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023, menjadi sebesar Rp. 38.925.894.209, dengan rincian belanja Rp. 37.128.294.209 dan belanja modal Rp 1.797.600.000. Target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 termuat dalam Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Target Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur
APBD Perubahan Tahun 2024

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	5
1	Belanja Operasi	37.128.294.209	95,38
	Belanja Pegawai	1.969.038.581	5,30
	Belanja Barang dan Jasa	4.505.953.108	12,14
	Belanja Hibah	30.653.302.520	82,56
2	Belanja Modal	1.797.600.000	4,62
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.797.600.000	100
	Total	38.925.894.209	100

Sumber : DPA-P Badan Kesbangpol Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang termuat dalam RENSTRA 2021 – 2026

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana

tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Akuntabilitas Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.2.1. SASARAN STRATEGIS 1

TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS

Kerukunan antar umat beragama merupakan kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama, tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerja sama antar umat beragama. Peningkatan kerukunan beragama dan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

Memelihara ketentraman, ketertiban serta menumbuhkembangkan keharmonisan dimasyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

3.2.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)”. Capaian kinerja

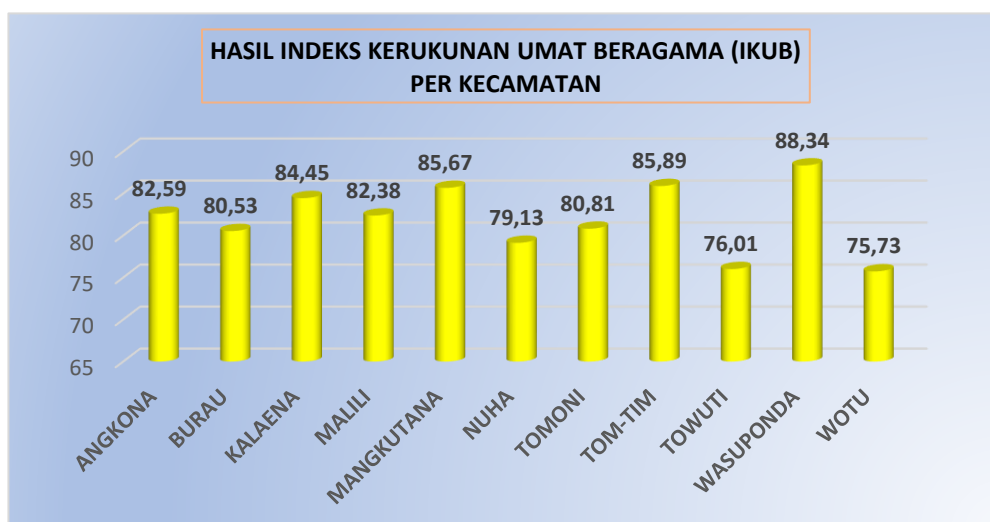
sasaran strategis 1 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KET
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	79.46	80.47	101.27	Sangat Tinggi

Dari table diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja Sasaran 1 mencapai angka di atas 100%. Berdasarkan hasil pengukuran indeks kerukunan umat beragama (IKUB) yang dikerjasamakan dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada tahun 2024 di 11 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur melalui *metode multistage random sampling*. Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Luwu Timur sebesar 80.47% atau capaian 101.27% dari target kinerja 79.46%.

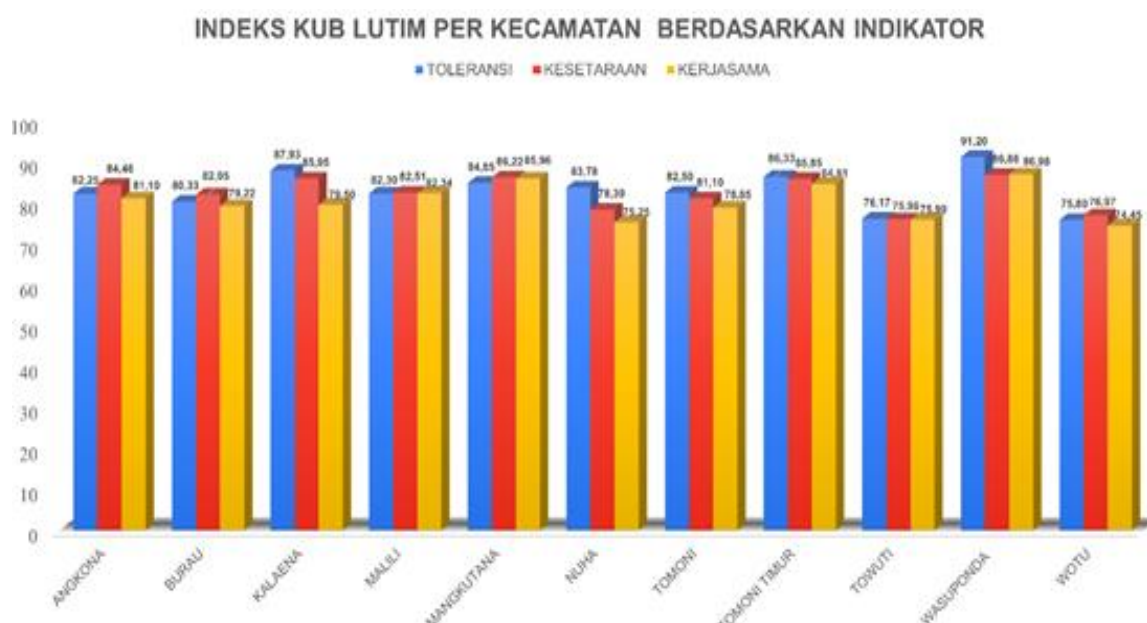
Berikut data hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) perkecamatan



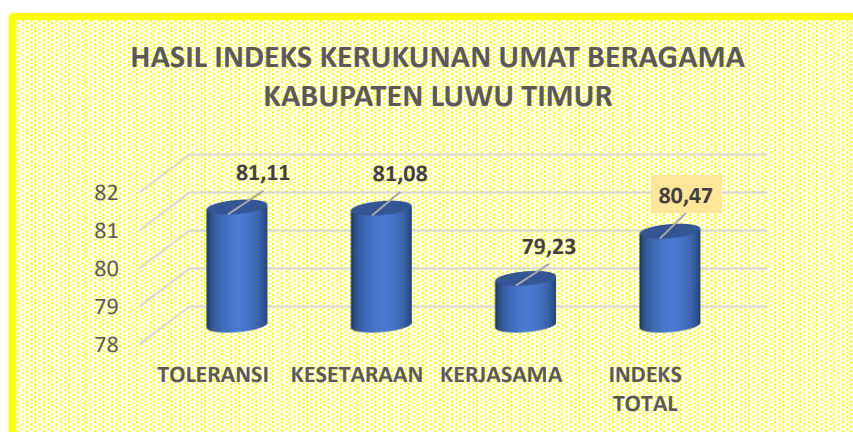
Perolehan Indeks dari 11 kecamatan di Luwu Timur bahwa terdapat delapan kecamatan dengan nilai indeks di atas nilai Indeks Kabupaten, yakni: Kecamatan Wasuponda 88,34 (Sangat

Tinggi), Kecamatan Mangkutana 85,67 (sangat Tinggi), Kecamatan Tomoni Timur 85,59 (Sangat Tinggi), Kecamatan Kalaena 84,45 (Sangat Tinggi), Kecamatan Angkona 82,59 (Sangat Tinggi), Kecamatan Malili 82,38 (Sangat Tinggi), Kecamatan Tomoni 80,81 (Sangat Tinggi), dan Kecamatan Burau 80,53 (Sangat Tinggi). Selanjutnya tiga (3) kecamatan lainnya di bawah nilai indeks Kabupaten, namun kesemuanya terkategori Tinggi yakni Kecamatan Nuha 79,13 (Tinggi), Kecamatan Towuti 76,01 (Tinggi), dan Kecamatan Wotu 75,73 (Tinggi).

Adapun capaian indeks per indiktaor pada masing- masing kecamatan pada grafik di bawah ini:



Berdasarkan hasil pengukuran indeks kerukunan umat beragama (IKUB) pada 11 (sebelas) kecamatan tersebut terhadap 3 indikator yaitu *toleransi*, *kesetaraan*, dan *Kerjasama* diperoleh capaian nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2024 sebesar 80,47%. Berikut grafik capaian indeks kerukunan umat beragama :



Pencapaian positif yang ditunjukkan pada sasaran strategis 1 dengan indikator “Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)” diperoleh dengan formula.

$$\text{Indeks KUB} = \frac{\text{Rata-Rata Capaian Indeks dimensi indicator}}{\text{Variabel dibagi dimensi indicator variable}}$$

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketentraman di Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun system peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama. Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya mengintensifkan dialog, koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, kelompok masyarakat (alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda), membangun karakter bangsa, melestarikan nilai Pancasila dan kearifan local, Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Dalam membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2.1.2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN LALU

Selanjutnya, target dan realisasi kinerja sasaran strategis terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2024 dengan tahun lalu dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.

Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terciptanya kerukunan umat beragama yang hamonis	Indeks Kerukunan umat beragama (IKUB)	2023	75,92%	79,46%	104,66%
		2024	79,46%	80,47%	101,27%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis dengan indicator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2024 mengalami kenaikan dengan realisasi 80,47% atau meningkat 1,01% dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur semakin baik dalam hal toleransi, kesetaraan maupun Kerjasama antar umat beragama.

3.2.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Jika melihat perbandingan realisasi indicator kinerja tahun 2024 sebesar 80,47% terhadap target akhir renstra tahun 2026 sebesar 76,85%, maka secara umum telah melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan atau melampaui sebesar 3,62%.

Berikut table perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN I : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS				TARGET AKHIR RENSTRA 2026 (%)
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	TARGET TAHUN 2024 (%)	REALISIASI TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN TAHUN 2024 (%)	
	79,46	80,47	101,27	76,85

3.2.1.4 PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL ATAU DAERAH LAIN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja

daerah/instansi lain.

Berdasarkan data realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yaitu 79,04%. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yaitu 80,47%, maka nilai IKUB Kabupaten Luwu Timur *melampaui dari nilai IKUB Propinsi Sulawesi Selatan*. Dengan selisih realisasi nilai IKUB yaitu 1,43%.

3.2.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis yaitu :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur terus melakukan sosialisasi aturan-aturan dan moderasi beragama di masyarakat;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan program-program yang berkaitan dengan kerukunan dan moderasi beragama;
3. Telah terbentuknya tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kader Bela Negara (FKBN) Tim Informan Kabupaten Luwu Timur, Tim Terpadu Pencegahan, pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat;
4. Terjalannya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Luwu Timur dan instansi lainnya dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan konflik sosial sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat

menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah;

5. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan serta menjaga kerukunan antar umat beragama dimasyarakat.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Pengetahuan masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama masih kurang;
2. Heterogenya masyarakat Kabupaten Luwu Timur, sehingga rawan terjadi gesekan sosial, yang tentunya dapat berdampak pada tingkat kerukunan dimasyarakat;
3. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas deteksi dini dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menjaga kerukunan dan menekan gesekan-gesekan sosial serta potensi konflik yang mungkin terjadi
2. Memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur;
3. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah dan;
4. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

3.2.1.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan forum–forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan memasang papan himbauan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.
Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Stategis I
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Predikat Kinerja
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79.46	80.47	101.27	3.393.539.210	3.316.692.661	97.74%	Sangat Tinggi
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%	80%	80%	1,296,215,300	1,273,793,101	98.27%	Tinggi
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%	100%	100%	589,977,460	546,234,560	92.59%	Sangat Tinggi
	3. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	1,507,346,450	1,496,665,000	99.29%	Sangat Tinggi

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	101,27%	97,74%	2,26%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Indeks Kerukunan umat beragama (IKUB)*” adalah 2,26%

3.2.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Tujuan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sasaran program adalah meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Dengan indicator program yaitu persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan. Target kinerja 100% terealisasi 80% dengan capaian kinerja 80% (tinggi). Target kinerja tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga. Adapun formula indikatornya adalah :

Jumlah Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan x 100%.

= 4 Kebijakan / 5 Kebijakan X 100%

= 80%

Kebijakan-kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan Tahun 2024 yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Pasan 5 ayat (2) bahwa Bupati bertanggungjawab terhadap peningkatan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten/Kota.

Dari 5 (lima) kebijakan yang diamanahkan pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu *Peningkatan kesadaran beda negara*. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah di implementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social dan budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, berikut table capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Nilai-Nilai Wasbang yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang direncanakan x 100%	100%	80%	80%	Kegiatan yang diamanahkan dan dilaksanakan di Tahun 2024 : 1. Kegiatan Pembentukan Paskibraka Kabupaten Luwu Timur 2. Kegiatan Study Wawasan Nusantara kepada Paskibraka Tahun 2024 3. Kegiatan penguatan forum pembauran kebangsaan dan pendataan suku-suku dan etnis yang ada di Kabupaten Luwu Timur 4. kegiatan penguatan ideologi Pancasila yaitu berupa launching Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional 5. kegiatan peningkatan kesadaran bela negara. kegiatan ini tidak dilaksanakan, dikarenakan adanya efisiensi anggaran Target kinerja kegiatan tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi anggaran tahun 2024
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	60 Orang	0 Orang	0%	Direncanakan akan dilaksanakan Rapat Kerja dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-76. Namun kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran tahun 2024

		dan Sejarah kebangsaan	kebangsaan				
1.2	Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka	Jumlah paskibraka	70 Orang	70 Orang	100%	Terlaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Tahun 2024

Dokumentasi kegiatan “Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan”



Dokumentasi “Pembentukan Paskibraka 2024”



Dokumentasi Kegiatan “Studi Wawasan Nusantara di Yogyakarta



Dokumentasi "Launching 10 Juta Bendera"

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan suatu negara atau masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

Tujuan program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara atau masyarakat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya . Dengan indikator program Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Realisasi 100% dari target 100% atau capaian 100% (sangat tinggi). Adapun formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya} \\ & \text{yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketahanan} \\ & \text{ekonomi, social dan budaya yang direncanakan} \times 100\% \\ & = 4 \text{ Kegiatan} / 4 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan dan dilaksanakan ditahun 2023 yaitu :

1. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
2. Fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;
3. Fasilitasi penghayat kepercayaan di daerah; dan

4. Koordinasi dan monitoring ketahanan ekonomi, social dan budaya di daerah.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, berikut table capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang dilaksanakan di tahun 2024, yaitu 1. Kegiatan Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur 2. Kegiatan Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024 3. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 4. Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	446 Orang	346 Orang	78%	1. Kegiatan Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan jumlah peserta 41 orang 2. Kegiatan Coaching dan expose pendahuluan pengukuran IKUB dengan jumlah peserta sebanyak 175 orang 3. Kegiatan expose hasil sementara pengukuran indeks kerukunan umat beragama (IKUB) dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang 4. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang 5. Kegiatan expose akhir Hasil IKUB dengan target peserta sebanyak 100 orang. Tidak terealisasi, dikarenakan adanya efisensi anggaran.

Dokumentasi kegiatan “Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya”



Dokumentasi “Kegiatan Pengukuran IKUB Tahun 2024”



Dokumentasi “Kegiatan Raker FKUB ”



Dokumentasi “Kegiatan Sosialisasi P4GN ”



Dokumentasi “Kegiatan Pamantauan Ketahanan Eksosbud ”

c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan suatu negara atau masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan konflik sosial.

Tujuan program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial adalah meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara aparat keamanan, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya dalam menghadapi ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dimasyarakat

Sasaran program ini adalah meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social. Dengan indicator kinerja Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social. Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% (sangat tinggi). Adapun formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kejadian atau konflik yang ditangani dibagi jumlah kejadian atau} \\ & \text{konflik yang terdata} \times 100\%. \\ & = 49 \text{ Kejadian dan konflik} / 49 \text{ kejadian dan konflik} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.
Data Konflik dan Kejadian
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Konflik Lahan	2 Kasus/kejadian
2.	Konflik Perbatasan	1 Kasus/kejadian
3.	Konflik Politik	1 Kasus/kejadian
4.	Konflik Agama	0 Kasus/kejadian
5.	Konflik Suku	0 Kasus/kejadian
6.	Aksi Kriminal	9 Kasus/kejadian
7.	Aksi Demonstrasi	20 Kasus/kejadian
8.	Bencana	6 Kasus/kejadian
9.	Wabah Penyakit	0 Kasus/kejadian
10.	Lain-Lain	10 Kasus/kejadian
JUMLAH		49 KEJADIAN/KONFLIK

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik – Kesbang

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, berikut table capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang direncanakan 100%	100%	100%	100%	Kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dilaksanakan di tahun 2024, yaitu 1. Kegiatan rapat Koordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (FORKIPIMDA); 2. Kegiatan Rapat Kerja dan Evaluasi Tim Kewaspadaan Daerah 3. Kegiatan Rapat Kerja KOMINDA 4. Kegiatan Pemantauan dan deteksi dini keamanan dan ketertiban
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik didaerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	300 Orang	300 Orang	100%	1. Kegiatan Rapat Koordinasi FORKOPIMDA dengan jumlah peserta sebanyak 155 Orang 2. Rapat Kerja dan Evaluasi Tim Kewaspadaan Daerah sebanyak 2 kali rapat kerja dengan jumlah peserta masing-masing 45 orang 3. Rapat Kerja KOMINDA dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	4 Laporan	100%	Tersusunnya laporan kewaspadaan daerah dan orang asing

Dokumentasi kegiatan “Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial”





Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja "KOMINDA"



Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja "Tim Kewaspadaan"



Dokumentasi Kegiatan "Pemantauan Situasi Daerah"

3.2.2. SASARAN STRATEGIS – 2

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan umum dengan indicator sasaran yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Local. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu nasional dan local sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

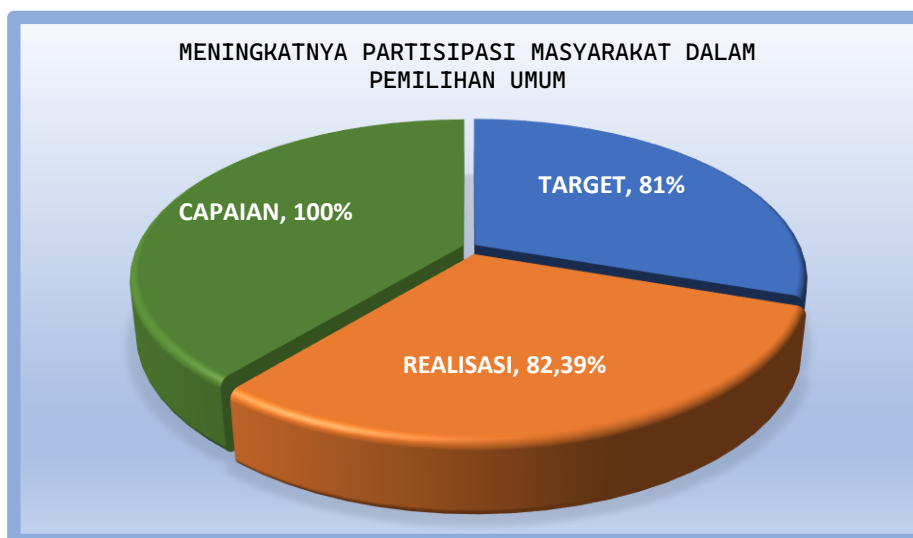
3.2.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Umum” ditetapkan 1 (satu) indicator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal”. Realisasi dan capaian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS – 2
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Tingkat partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan umum nasional dan lokal	Persen	81	82,39	101,71	Sangat Tinggi

Grafik 3



Sumber : Badan Kesbangpol 2024

Dari table dan grafik 3. diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal yaitu 82,39% melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 81% dengan capaian kinerja 101,71%.

Pencapaian positif indikator sasaran Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal tersebut diperoleh dari formulasi :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Suara dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap} \times 100\% \\ & = 179,883 \text{ suara} / 218,322 \text{ DPT} \times 100\% \\ & = 82,39\% \end{aligned}$$

Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(Pilpres dan Pileg) Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.316	20.478	240	20.718	81.84
2	Wotu	24.116	19.953	333	20.286	84.12
3	Tomoni	19.318	15.941	306	16.247	84.10
4	Tom-Tim	10.217	8.404	92	8.496	83.16
5	Mangkutana	16.392	12.930	164	13.094	79.88
6	Kalaena	9.125	7.385	78	7.463	81.79
7	Angkona	18.244	14.919	311	15.230	83.48
8	Malili	30.587	24.910	366	25.276	82.64
9	Wasuponda	15.793	12.453	102	12.555	79.50
10	Towuti	31.968	26.879	313	27.192	85.06
11	Nuha	17.246	13.237	89	13.326	77.27
Total		218.322	177.489	2.394	179.883	82,39

Tabel 3.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan)

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.398	19.453	738	20.191	79,50
2	Wotu	24.373	19.108	806	19.914	81,71
3	Tomoni	19.686	15.133	858	15.991	81,23
4	Tom-Tim	10.277	7.918	380	8.298	80,74
5	Mangkutana	16.537	12.178	450	12.628	76,36
6	Kalaena	9.067	7.085	253	7.338	80,93
7	Angkona	18.365	14.325	603	14.928	81,29
8	Malili	31.499	24.310	954	25.264	80,21
9	Wasuponda	15.853	11.633	413	12.046	75,99
10	Towuti	33.549	24.958	774	25.732	76,70
11	Nuha	17.416	11.229	397	11.626	66,75
Total		222.020	167.330	6.626	173.956	78.30

Tabel 3.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur)

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.398	19.881	308	20.189	79,49
2	Wotu	24.373	19.643	268	19.911	81,69
3	Tomoni	19.686	15.778	213	15.991	81,23
4	Tom-Tim	10.277	8.154	144	8.298	80,74
5	Mangkutana	16.537	12.456	169	12.625	76,34
6	Kalaena	9.067	7.221	117	7.338	80,93
7	Angkona	18.365	14.647	281	14.928	81,29
8	Malili	31.499	25.036	225	25.261	80,20
9	Wasuponda	15.853	11.904	142	12.046	75,99
10	Towuti	33.549	25.460	270	25.730	76,69
11	Nuha	17.416	11.452	173	11.625	66,75
Total		222.020	171.632	2310	173.942	78,35

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

3.2.2.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Selanjutnya, target dan realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum dengan indicator kinerja Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.
Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM						
INDIKATOR KINERJA SASARAN "PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU NASIONAL DAN LOKAL	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	80,46	80,46	100	81	82,39	101,71

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum dengan indicator kinerja Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local tahun 2024 mengalami kenaikan dengan realisasi 82,39% atau meningkat 1,93% dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam menggunakan hak pilih semakin baik.

3.2.2.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local sampai dengan akhir RPJMD ditargetkan 81,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 82,39% telah melampaui dari target jangka menengah. Pencapaian ini didukung oleh upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terus melakukan kegiatan-kegiatan Pendidikan politik dimasyarakat, serta berkoordinasi/berkolaborasi dengan instansi terkait dan partai politik untuk melakukan Pendidikan politik yang massif dimasyarakat dan berupaya menciptakan pemilu yang aman, damai dan mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

Berikut table realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM				TARGET AKHIR RENSTRA 2026 (%)
INDIKATOR KINERJA SASARAN :	TARGET TAHUN 2024 (%)	REALISIASI TAHUN 2024 (%)	CAPAIAN TAHUN 2024 (%)	
"TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU NASIONAL DAN LOKAL	81	82,39	101,71	81

3.2.2.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja

yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Secara nasional target kinerja untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan umum serentak (PILEG dan PILPRES) adalah 79,50%. Berdasarkan data numerik dari KPU Kabupaten Luwu Timur capaian partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya melampaui dari target nasional yang ditetapkan yaitu 82,39%.

3.2.2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal yaitu

- a. Terjalinnya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun partai politik dalam melaksanakan Pendidikan politik dimasyarakat;
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- c. Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan politik;
- b. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melalukan tugas pemantauan situasi politik dimasyarakat

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- b. Melakukan sosialisasi yang masif, terkait Pendidikan politik

dimasyarakat;

- c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

3.2.2.6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik dimasyarakat.

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	81%	82,39%	101,71%	30.874.662.320	30.842.926.734	99.89%
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100%	100%	30.816.266.720	30.789.002.434	99.91%
	2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	157%	157%	58.395.600	53.924.300	92.34%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	100%	99,89%	0,11%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal* ” adalah 0,11%

3.2.2.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah suatu program untuk meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan pendidikan politik, etika, dan budaya politik di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatkan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan

etika serta budaya politik. Dengan indikator program yaitu Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Indikator program persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Adapun formula indikatornya adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Partai Politik yg memenuhi syarat pengajuan Bantuan} \\ & \text{Keuangan Partai Politik} \div \text{Jumlah Partai Politik yang} \\ & \text{menerima bantuan Keuangan Partai Politik} \times 100\% \\ & = 10 \text{ Partai Politik} / 10 \text{ Parpol} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Adapun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan keuangan partai politik dan yang menerima bantuan keuangan berjumlah 10 partai politik.

Tabel 3.
Daftar Partai Politik dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Tahun Anggaran 2024

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara	Bantuan Keuangan / Suara (Rp)	Besaran Bantuan Keuangan (Rp)	Ket
1.	PKB	1	4.653	4.647	21.622.491,-	Terealisasi
2.	GERINDRA	4	14.829	4.647	68.910.363,-	Terealisasi
3.	PDI-P	3	16.371	4.647	76.076.037,-	Terealisasi
4.	GOL-KAR	7	33.088	4.647	153.759.936,-	Terealisasi
5.	NASDER	4	22.437	4.647	104.264.739,-	Terealisasi
6.	PKS	1	10.023	4.647	46.576.881,-	Terealisasi
7.	PAN	4	18.160	4.647	84.389.520,-	Terealisasi
8.	HANURA	3	11.093	4.647	51.549.171,-	Terealisasi
9.	DEMOKRAT	2	11.516	4.647	53.514.852,-	Terealisasi
10.	PBB	2	2.535	4.647	11.780.145,-	Terealisasi
JUMLAH		30 Kursi	144.705 Suara		Rp. 672.444.135,-	

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, berikut table capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	Jumlah kegiatan peningkatan Pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan peningkatan Pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik yang direncanakan x 100%	100%	100%	100%	Kegiatan pelaksanaan bidang Pendidikan politik dilaksanakan di tahun 2024, yaitu 1. Kegiatan rapat Rapat Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik 2. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik 3. Kegiatan Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 4. Kegiatan Pemantauan dalam rangka pemilihan umum serentak PILPRES, PILEG dan Pemilihan Kepala Daerah
1.1	Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Tersusun 4 dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, serta pemantauan situasi politik di daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	politik						
1.2	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	20 Orang	20 Orang	100%	Terlaksana kegiatan rapat evaluasi dan monitoring bantuan keuangan partai politik dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang dari unsur pengurus partai politik
1.2	Sub kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu	4 lap	4 laporan	100%	Tersusunnya 4 laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik serta pemantauan situasi politik di daerah

Dokumentasi Kegiatan Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



Dokumentasi Kegiatan “Rapat Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik



Dokumentasi Kegiatan “ Sosialisasi Pendidikan Politik”



Dokumentasi Kegiatan “ Rapat Evaluasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik”



Dokumentasi Kegiatan “ Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik Daerah”

b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (OKM) adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan beroperasi secara transparan dan akuntabel.

Sasaran program yaitu meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan indicator kinerja program yaitu Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi. Capaian pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan terealisasi 157% dari target 100% dengan capaian kinerja 157% (sangat tinggi). Ditahun 2024 sebanyak 164 kelompok organisasi yang terdaftar dan diawasi dari target 104 kelompok organisasi.

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi dibagi jumlah ormas yang} \\ &\text{ditargetkan (n) x 100\%} \\ &= 164/104 \times 100\% \\ &= 157\% \end{aligned}$$

Tabel 3.

Data Ormas/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Rumah Ibadah

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
1	Masjid Nurul Ummal	Jl. Jenderal Sudirman Ds. Balantang Kec. Malili
2	Taman Kanak-Kanak Alam Islamic Rainbow School	Jl. Tambang C Ds. Wonorejo Timur Kec. Mangkutana
3	Gereja Pouk Malili	Jl. Pongtiku Ds. Puncak Indah Kec. Malili
4	Masjid Nurul Iman	Jl. Poros Malili Wotu Ds. Ussu Kec. Malili
5	Masjid Al Fatimah Aslam	Jl. Poros Patengko Dsn. Harapan Mandiri Ds. Patengko Kec. Tomoni Timur
6	Masjid Al-Muhajirin	Jl. Poros Mulyasri Ds. Mulyasri Kec. Tomoni
7	Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tenang	Ds. Wewangriu Kec. Malili
8	Gereja Sidang Jemaat Kristus Tawibaru	Ds. Pancakarsa Kec. Mangkutana
9	Kelompok Pembudidaya Ikan Burung Laut	Jl. Pinrang Ds. Wewangriu Kec. Malili
10	Gereja Kibaid Jemaat Ujung Batu	Jl. Latiba Dsn. Ujung Batu Ds. Watang Panua Kec. Angkona
11	Kelompok Pembudidaya Ikan Bangau Putih	Ds. Wewangriu Kec. Malili
12	Masjid Ar - Rahman	Dsn. Suluminaga Ds. Lakawali Pantai Kec. Malili
13	Kelompok Pembudidaya Ikan Gracilaria Mandiri	Ds. Wewangriu Kec. Malili
14	Masjid Rahmatullah	Dsn. Cerekang Ds. Manurung Kec. Malili

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
15	Kelompok Pembudidaya Ikan Tabusiri Jaya	Ds. Wewangriu Kec. Malili
16	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Urako	Jl. Dongi Ds. Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
17	Pura Jagat Kertiyasa Lakawali	Ds. Londoe Ds. Lakawali Kec. Malili
18	Kelompok Bermain Karya Mufidah	Jl. Veteran No. 43 Ds. Langkea Raya Kec. Towuti
19	Kelompok Bermain Ukeanandra Towuti	Jl. Veteran Ds. Langkea Raya Kec. Towuti
20	Masjid Al Ikhlas	Ds. Puncak Indah Kec. Malili
21	Masjid Al Ikhlas	Jl. Ki Hajar Dewantara Ds. Puncak Indah Kec. Malili
22	Taman Kanak-Kanak Al Bina	Jl. Poros Sumber Alam Ds. Mandiri Kec. Tomoni
23	Taman Kanak-Kanak Gunung Sari	Dsn. Beringin Ds. Tawakua Kec. Angkona
24	Kelompok Tani Budidaya Ikan Perjuangan	Ds. Maliwowo Kec. Angkona
25	Kelompok Tani Budidaya Rumput Laut Brokoli	Ds. Bawalipu Kec. Wotu
26	Kelompok Tani Pembudidaya Rumput laut Paten Katonik	Jl. Simpursiang Ds. Lampenai Kec. Wotu
27	Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pasir Putih Langkara	Ds. Tampinna Kec. Angkona
28	Kelompok Tani Padaidi	Ds. Sumber Makmur Kec. Kalaena
29	Kelompok Nelayan Tangkap Merpati	Ds. Wewangriu Kec. Malili
30	Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia Jemaat Bandoa	Dsn. Marinindi Ds. Lera Kecamatan Wotu
31	Gereja Toraja Jemaat Antiokhia Angkona	Jl. Lambaru Dsn. Angkona Ds. Tampinna Kec. Angkona
32	SDIT Wahdah Islamiyah 05 Kalaena	Jl. Poros Kalaena Dsn. Jati Rejo Ds. Kalaena
33	Gereja Segala Bangsa Jemaat Bukit Sion Korondui	Dsn. Koronduy, Ds. Cendana Kec. Burau
34	Madrasah Tsanawiyah Lambaran Harapan	Ds. Laro Kec. Burau
35	Masjid Istiqamah	Ds. Jalajja Kec. Burau
36	Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Bahtera Kasih Mungkulande	Ds. Kasintuwu Kec. Mangkutana
37	Masjid Babbul Jannah	Jl. Garuda Dsn. Kalaena Baru Ds. Sindo Agung Kec. Mangkutana
38	Masjid Al-Ikhlas	Dsn. Mabasi Ds. Jalajja Kec. Burau
39	Masjid Al-Amal Griya Alam Towuti	Jl. G. Sora No. 03 Ds. Wawondula Kec. Towuti
40	Gereja Toraja Jemaat Mantaipi	Jl. Poros Tawakua Mantadulu Kec. Angkona
41	Masjid Jabal Samaroh	Jl. Rante Mario Dsn. Mandiri Ds. Rante Mario Kec. Tomoni
42	Pura Kawitan Arya Wang Bang Pinatih	Jl. Astina Pura Dsn. Karambua 1 Barat Ds. Karambua Kec. Wotu
43	Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pura Prajapati	Jl. Pantai Ujung Suso Ds. Benteng Kec. Wotu
44	Masjid Al-Ma'un	Dsn. Fajar Indah Ds. Puncak Indah Kec. Malili
45	Kelompok Tani Budidaya Ikan Karya Lambaru Makmur	Ds. Tampinna Kec. Angkona
46	Kelompok Tani Budidaya Ikan Sipammasemase	Ds. Watangpanua Kec. Angkona
47	Kelompok Tani Budidaya Ikan Katonik Lauro	Ds. Tampinna Kec. Angkona
48	Kelompok Tani Budidaya Rumput Laut Nelayan Katonik	Ds. Bawalipu Kec. Wotu
49	Kelompok Usaha Bersama Lecebba Jaya	Ds. Lauwo Kec. Burau
50	Kelompok Tani Pembudidaya Kanna	Ds. Lampenai Kec. Wotu
51	Masjid Nurul Iman	Jl. Trans Sulawesi Ds. Mandiri Kec. Tomoni
52	Masjid Al-Amin	Dsn. Paorebbae Ds. Wewangriu Kec. Malili
53	Gereja Katolik Maria Immaculata Sorowako	Jl. S. Hasanuddin No. 1-3 Sorowako Kel. Magani Kec. Nuha

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
54	Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus Xaverius Wawondula	Jl. Budi Utomo No. 1 Ds. Lioka Kec. Towuti
55	Masjid Darul Amin	Perumahan Bumi Sawita Permai Ds. Puncak Indah Kec. Malili
56	Masjid Babul Jannah	Jl. Dam Larona Ds. Balambano Kec. Wasuponda
57	Pura Prajapati Parisada Hindu Dharma Indonesia	Jl. Pura Jagat Natha Ds. Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur
58	Masjid Al-Ijtihad	Jl. Wisata Pantai Balo-Balo Ds. Balo-Balo Kec. Wotu
59	Masjid Ash-Shafaa	Jl. Andi Mappesabbi Dsn. Tambaga Ds. Jalajja Kec. Burau
60	Masjid Baitussa'adah	Rusunawa Ds. Sorowako Kec. Nuha
61	Masjid Nur Hidayah	Jl. Amasi Lestari Ds. Balambano Kec. Wasuponda
62	Kelompok Dapur Malili River	Ds. Wewangriu Kec. Malili
63	Masjid At-Taqwa	Dsn. Lambaru Ds. Tampinna Kec. Angkona
64	Masjid Babul Jihad	Jl. Emmi Saelan Lrg. 2 Trans Ds. Puncak Indah Kec. Malili
65	Masjid Nur Hidayah	Jl. Amasi Lestari Ds. Balambano Kec. Wasuponda
66	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Ebenhaezer Manunggal	Ds. Manunggal Kec. Tomoni Timur
67	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Bukit Sion Kalpataru	Ds. Kalpataru Kec. Tomoni Timur
68	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Elohim Bandoa	Ds. Lera Kec. Wotu
69	Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Jemaat Nehemia Sorowako	Jl. Kopatea No. 11 Bumper Sorowako Kec. Nuha
70	Masjid Al-Muhajirin	Ds. Pertasi Kencana Kec. Kalaena
71	Gereja Toraja (GT) Jemaat Pniel Puncak Indah	Jl. Pongtiku Ds. Puncak Indah Kec. Malili
72	Pura Pangeran Tangkas Kori Agung	Jl. Utama 5 Lr. 6 Ds. Taripa Kec. Agkona
73	Pura Dalem Desa Adat Balirejo-Wanasari	Pura Giri Tirta Nadhi Balirejo Ds. Wanasari Kec. Angkona
74	Masjid Nurul Iman	Dsn. Pabumas Ds. Lambarese Kec. Burau
75	Kelompok Sanggar Seni Siwa Nataraja Pura Jagat Natha	Ds. Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur
76	Gereja Protestan di Indonesia Luwu Jemaat Imanuel Taripa	Dsn. Nusantara Ds. Taripa Kec. Angkona
77	Gereja Protestan di Indonesia Luwu Jemaat Bukit Sion Tabarano	Dsn. Tabara Ds. Tabarano Kec. Wasuponda
78	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Karmel Korombua	Jl. Poros Malili Ds. Karambua Kec. Wotu
79	Masjid Al-Mujahidin	Ds. Baruga Kec. Malili
80	Masjid Al-Qalam	Jl. Poros Urako-Dongi Ds. Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
81	Masjid Al-Anshar	Dsn. Ujung Batu II Ds. Maliwowo Kec. Angkona
82	Kelompok Pembudidaya Ikan Pokdakan "Sinar Tampao"	Dsn. Salabu Ds. Wewangriu Kec. Malili
83	Kelompok Pembudidaya Ikan Pokdakan "Mario Marennu"	Dsn. Salabu Ds. Wewangriu Kec. Malili
84	Gereja Kristen Indonesia Luwu (BPIL) Jemaat Betesda Purwosari	Jl. Andi Hatta M. Lr. Jalan Tani Ds. Purwosari Kec. Tomoni Timur
85	Kelompok Budidaya Ikan Ulam Tunas Jaya	Ds. Taripa Kec. Angkona
86	Kelompok Nelayan Tangkap Kub Toddopuli Tangkalasi	Ds. Maliwowo Kec. Angkona
87	Kelompok Nelayan Tangkap Kub Jambu	Ds. Tampinna Kec. Angkona

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
88	Kelompok Budidaya Rumput Laut Cotoni Tani Nelayan	Ds. Lampenai Kec. Wotu
89	Kelompok Usaha Bersama Tunas Baru Poreang	Dsn. Poreang Ds. Lakawali Pantai Kec. Malili
90	Kelompok Usaha Bersama Bersama Bunga Karang	Ds. Balantang Kec. Malili
91	Kelompok Pengolahan Ikan Amanah	Ds. Tampinna Kec. Angkona
99	Kelompok Seni Kuda Lumping Turonggo Tresno Budoyo	Ds. Kalaena Kiri Kec. Kalaena
98	Pura Puncak Sari	Ds. Bone Pute Kec. Burau
99	Kelompok Seni Kuda Lumping Turonggo Tresno Budoyo	Ds. Kalaena Kiri Kec. Kalaena
100	Gereja Toraja Jemaat Sikamase Klasik Wotu	Dsn. Pabumas Ds. Lambarese Kec. Burau
101	Gereja Masehi Injil di Minahasa Jemaat Syalom Maleku	Dsn. Pusalemba Ds. Maleku Kec. Mangkutana
102	Gereja Masehi Injil di Minahasa Jemaat Hosiana Bayondo	Dsn. Balele Ds. Bayondo Kec. Mangkutana
103	Remaja Pencinta Musik Towuti Repsiti	Jl. Gunung Wawemeusa No. 04 Wawondula Kec. Towuti
104	Masjid Babul Iman	Jl. Peda-Peda Ds. Balantang Kec. Malili
105	Masjid Al Istiqomah	Jl. Danau Towuti No. 1 Ds. Sorowako Kec. Nuha
106	Masjid Al Mubaraq	Dsn. Lane Ds. Jalajja Kec. Burau
107	Kelompok Sanggar Seni Sanatana Dharma	Dsn. Mertaguna Ds. Mantadulu Kec. Angkona
108	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Air Hidup Sorowako	Jl. Dipanegoro No. 2 Ds. Magani Kec. Nuha
109	Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Jemaat Ekklesia Bandoa	Dsn. Maranindi Ds. Lera Kec. Wotu
110	Gereja Toraja Jemaat Sikamase Cabang Kebaktian Imanuel Mambotu Klasik Wotu	Dsn. Koronduy, Ds. Cendana Kec. Burau
111	Pura Pasek Gelgel Santi Dharma Kerti	Jl. Poros Ds. Pepuro Barat Kec. Wotu
112	Pura Dalem Bakas	Dsn. Mertasari Ds. Mantadulu Kec. Angkona
113	Masjid Babul Jannah	Jl. Tani Ds. Lambara Harapan Kec. Burau
114	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Luwu Timur	Jl. Pahlawan Dsn. Campae Ds. Arolipu Kec. Wotu
115	Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur	Dsn. Kampung Baru Ds. Sumber Agung Kec. Kalaena
116	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)	Jl. Soekarno Hatta Ds. Puncak Indah Kec. Malili
117	Lembaga Kursus Dan Pelatihan Alya Computer Education "LPK & LKP-ACE"	Jl. Trans Sulawesi Ds. Balai Kembang Kec. Mangkutana
118	Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Luwu Timur	Jl. Dr. Samratulangi Ds. Puncak Indah
119	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Dsn. Sumber Nyiur Ds. Lampenai Kec. Wotu
120	Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma)	Jl. Tajanji No. 30 Dsn. Saluborro Ds. Bawalipu Kec. Wotu
121	Suffa Ekonomi dan Edukasi	Jl. Ahmad Yani No. 11 A. Ds. Baruga Kec. Towuti

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
122	Forum Pelajar Mahasiswa Luwu Timur Sulawesi Selatan Yogyakarta (Forma Lutim Sul-Sel Yogyakarta)	Jl. Abu Bakar Asidiq No. 77 Ds. Timampu Kec. Towuti
123	Pompepsi Luwu	Jl. Buton No. 12 Pontada Kel. Magani Kec. Nuha
124	LSM Triga Nusantara Indonesia	Jl. Rante Mario No. 13 Ds. Kalpataru Kec. Tomoni
125	Asosiasi Pengusaha Lokal Malili (APLM)	Jl. RA. Kartini Dsn. Mallaulu Indah Lr. 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili
126	Pemuda Pancasila	Ds. Puncak Indah Kec. Malili
127	Kelompok Pembudidaya Ikan Pokdakan Sipakarennu	Dsn. Podomoro Ds. Lakawali Kec. Malili
128	Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Masagenae	Ds. Lakawali Kec. Malili
129	Masjid Nurul Junaidiyah	Dsn. Dongi-Dongi Ds. Cendana Kec. Burau
130	Mushollah Nur At-Tarbiyah	Jl. Montolalu Kel. Malili Kec. Malili
131	Gereja Pouk Jemaat Wawondula	Jl. Jend. Soedirman No. 12 Ds. Wawondula Kec. Towuti
132	Masjid An-Nashir	Jl. SM. Al Jufri Dsn. Madani Ds. Terengge Kec. Wotu
133	Pura Pasek Gelgel	Dsn. Buana Ds. Alam Buana Kec. Tomoni Timur
134	Pura Saren Gong	Dsn. Buana Ds. Alam Buana Kec. Tomoni Timur
135	Kelompok Pengolahan Perikanan Hasil Perikanan Inara Sejahtera	Ds. Matompi Kec. Towuti
136	Masjid Al-Ikhlas	Jl. Sukarno Hatta Dsn. Balambano Indah Ds. Puncak Indah Kec. Malili
137	Rumah Tahfidz Qur'an Az Zahra	Jl. Flamboyan No. 4 Ds. Asuli Kec. Towuti
138	Gereja Toraja Jemaat Baku	Jl. Poros Andi Hasan Dsn. Baku Ds. Patengko Kec. Tomoni Timur
139	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Ekklesia Pattengko	Ds. Pattengko Kec. Tomoni Timur
140	Masjid Nurul Hidayah	Jl. Emmi Saelan Lorong 2 Ds. Puncak Indah Kec. Malili
141	Masjid Al-Madinah Ninda Kenzu	Jl. Garuda Komplek Perum Nindi Kenzu Ds. Matompi Kec. Towuti
142	Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Cabang Malili	Jl. Baso Dg. Tutu Rt. 001 Link. Waru Kel. Malili Kec. Malili
143	Gereja Kibaid Jemaat Wawondula	Jl. Budi Utomo No. 2 Ds. Lioka Kec. Towuti
144	Kelompok Usaha Bersama Setia Jaya	Ds. Manurung Kec. Malili
145	Kelompok Usaha Bersama Ekor Kuning	Ds. Harapan Kec. Malili
146	Kelompok Usaha Bersama Lintas Muara	Ds. Watangpanua Kec. Angkona
147	Kelompok Usaha Bersama Pengais Rejeki	Ds. Lakawali Kec. Malili
148	Kelompok Pengolahan Perikanan Hasil Perikanan Inara Sejahtera	Ds. Matompi Kec. Towuti
149	Kelompok Tani Budidaya Ikan Air Tawar Samaturu Marampa	Ds. Rante Mario Kec. Tomoni
150	Kelompok Usaha Bersama Lintas Angkona	Ds. Tampinna Kec. Angkona
151	Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Penolong	Dsn. Kayu Tanduk Ds. Matano Kec. Nuha
152	Masjid Jami'Mamba'ul Istiqomah	Dsn. Kamboja Ds. Wanasari Kec. Angkona
153	Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Jemaat Ekklesia	Ds. Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
154	Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Jemaat EL-Shaddai	Ds. Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
155	Kelompok Seni dan Budaya Padoe Malilino	Jl. A. Yani No. 78 Ds. Tabarano Kec. Wasuponda
156	Gereja Toraja Jemaat Wonosari	Ds. Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT
157	Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Gembala Pancakarsa	Ds. Pancakarsa Kec. Mangkutana
158	Gereja Toraja Jemaat Hosana Kayu Tanduk Cabang Kebaktian Kandang Domba	Ds. Matano Kec. Nuha
159	Masjid At-Taqwa	Ds. Laskap Kec. Malili
160	Mushollah Nur At-Tarbiyah	Jl. Montolalu Kel. Malili Kec. Malili
161	Kelompok Usaha Bersama Pengais Rejeki	Ds. Lakawali Kec. Malili
162	Kelompok Tani Budidaya Ikan Air Tawar Marampa	Ds. Rante Mario Kec. Tomoni
163	Masjid Nurul Junaidiyah	Dsn. Dongi-Dongi Ds. Cendana Kec. Burau
164	Masjid Rahmatullah	Ds. Lioka Kec. Towuti

Berikut data jumlah ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang terdaftar dan diawasi tahun 2021 - 2024

Tabel 3
Jumlah ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah yang terdaftar dan diawasi tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Ormas / LSM	20	19	4	17
2.	Rumah Ibadah (Mesjid)	30	23	32	45
3.	Rumah Ibadah (Gereja)	17	9	26	37
4.	Rumah Ibadah (Pura)	10	3	13	11
5.	Lembaga Pendidikan/Sekolah	0	0	167	8
6.	Kelompok Tani dan Nelayan	77	96	131	39
7.	Kelompok Seni	0	0	6	7
Jumlah		154	150	379	164

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, berikut table capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pemantauan Situasi	jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	Jumlah Ormas/LSM/Kelompok Tani/Rumah Ibadah/sekolah diberdayakan dan diawasi (n)	104 Kelompok	164 Kelompok	157%	Melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur, yang mensyaratkan kelompok tani/nelayan, rumah ibadah dan Lembaga Pendidikan serta kelompok seni untuk

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Politik						mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesbangpo
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas yang disusun	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas yang disusun tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan	100%	Tersusun 4 Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ormas

Dokumentasi Kegiatan Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



3.2.3. SASARAN STRATEGIS III



Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SPKD adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelayanan SKPD ini ditetapkan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Formula untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD dengan indikator kinerja “Nilai Sakip” yaitu :

Nilai Sakip (n-1)

3.2.3.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis – 3
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	Nilai	77,95	78,65	100,90%

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2024

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 78,65 dengan Kategori BB, dengan rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LAKIP Kesbangpol

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	NILAI	KATEGORI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10	–
2	Pengukuran Kinerja	30	23,10	–
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45	–
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	–
Jumlah		100	78,65	BB

3.2.3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN LALU

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

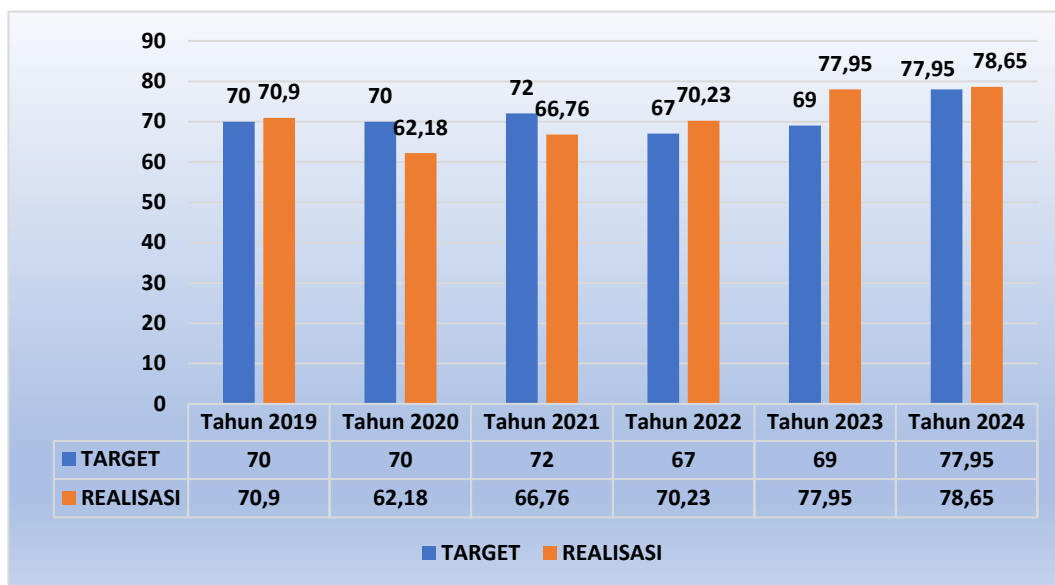
Tabel 3.
Nilai dan Kategori SAKIP
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2019 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai Sakip	Nilai	2019	70	70,9	BB	101,28
		2020	70	62,18	B	86,8
		2021	72	66,76	B	92,72
		2022	67	70,23	BB	104,82
		2023	69	77,95	BB	112,97
		2024	77,95	78,65	BB	100,90

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.
Nilai dan Kategori SAKIP
Badan Kesbangpol Kab. Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023



3.2.3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.
Realisasi Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN OPD				TARGET AKHIR RENSTRA 2026
INDIKATOR KINERJA SASARAN :	TARGET 2024	REALISIASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2023	
"NILAI SAKIP"	77,95	78,65	100,90%	72

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur realisasi NILAI SAKIP Tahun 2024 yaitu 78.65. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sampai tahun 2026, telah melampaui dari target jangka menengah

3.2.3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL ATAU CAPAIAN DAERAH LAINNYA

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang

telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara tingkat capaian Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2024, dimana Kesbangpol Kota Banjar mendapatkan nilai 71.5 dengan Predikat B, sementara Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 78,65 dengan Predikat BB. Nilai SAKIP antara Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dan Kesbangpol Kota Banjar terdapat selisih nilai sebesar 7.15, Namun Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur masih harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP-nya dimasa yang akan datang

3.2.2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2021–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Kurangnya SDM/Aparatur yang kompeten dibidangnya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
3. Belum optimalnya penyusunan perjanjian kinerja sampai ke tingkat staf/pelaksana
4. Monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja yang belum berjalan dengan baik

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian

- kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
 3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
 4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2.3.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memaksimalkan tugas-tugas pokok dan fungsi disetiap bidang dan pada level kasubag. Begitupun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada khususnya staf-staf atau jabatan pelaksana pada setiap bidang dengan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Nilai Sakip	77,95	78,65	100,90%	4,657,692,679	4,477,112,894	96.12%

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100%	96.51%	96.51%	4,657,692,679	4,477,112,894	96.12%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	96.51%	96.12%	3.88%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan program penunjang/pendukung dari pencapaian Sasaran *Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD* adalah 3.88%

3.2.3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pada triwulan IV terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 26 (dua puluh Enam) sub kegiatan, sebagai berikut

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

Sasaran program yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator program adalah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan IV Tahun 2024 adalah yaitu 98,58% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 98,58%. Capaian kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Formulasi mengukur capaian program :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan dibagi jumlah seluruh} \\ & \text{kegiatan} \times 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = 788,64\% / 8 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ & = 98.58\% \end{aligned}$$

Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Berikut table capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang direncanakan X 100%	100%	100%	100%	Tersusun dokumen perencanaan yaitu Renja Pokok 2025, Renja Perubahan 2024, LAKIP 2023, LKPJ 2023, Laporan Evaluasi Kinerja triwulan 1, 2 dan 3; Laporan Evaluasi Tahun 2024 RKPD Tw 1,2 dan 3 Tahun 2024
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen		100%	- Renja Pokok 2025; - Renja Perubahan 2024

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Dokumen RKA Pokok 2025 dan Dokumen RKA-Perubahan 2024
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	10 Laporan	10 Laporan	100%	- Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan sebanyak 4 laporan - Laporan Evaluasi RKPDP Triwulan sebanyak 4 laporan - LKIP 2023 sebanyak 1 laporan - LKPJ 2023 sebanyak 1 laporan
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dibagi Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun X 100%	100%	100%	100%	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan tahunan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/bln	14 Orang/bln	100%	Terbayarkan gaji dan tunjangan kepada 14 Orang ASN setiap bulan
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Laporan	18 Laporan	100%	- Laporan keuangan Bulanan sebanyak 12 laporan; - Laporan keuangan triwulan sebanyak 4 laporan; - Laporan keuangan semesteran sebanyak 1 laporan; - Laporan Keuangan tahunan sebanyak 1 laporan
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dibagi Jumlah	100%	100%	100%	Tersusun dokumen administrasi barang milik daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
			dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD X 100%				
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penatausahaan barang milik daerah setiap triwulan
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah X 100%	100%	100%	100%	Terelisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendukung kegiatan
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Tersusun dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada setiap triwulan
4.2	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	6 Orang	100%	- 2 orang mengikuti bimtek perencanaan dan penganggaran - 1 orang mengikuti bimtek TAPD - 1 orang mengikuti bimtek penatausahaan BMD - 2 orang mengikuti bimtek penyelenggaraan administrasi pemerintahan
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan	100%	97,14%	97,14%	Tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak mencapai

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
		daerah	administrasi umum perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah x 100%				target akibat adanya efisiensi anggaran
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Terpenuhinya/tersedianya komponen instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan (lampu, kabel, stop kontak, colokan, Dll)
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 Paket	4 Paket	80%	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan yaitu - 2 unit Laptop - 1 unit Printer - 1 Unit Alat pemadam kebakaran - Sedangkan pengadaan 1 unit gorden kantor tidak terealisasi dikarenakan "efisiensi anggaran"
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100%	Terpenuhinya/tersedianya bahan logistic kantor sesuai dengan kebutuhan (alat dan bahan kebersihan)
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Tersedianya barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	Tersedia 60 dokumen bahan bacaan
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	Jumlah laporan	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan kunjungan tamu

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
		fasilitasi kunjungan tamu	fasilitasi kunjungan tamu				
5.7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Tersusun laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi umum perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi umum perangkat daerah x 100%	100%	91,50%	91,50%	Tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional yang tidak mencapai target akibat adanya efisiensi anggaran
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	4 Unit	66,67%	Kendaraan dinas/opesional yang diadakan yaitu : - 1 unit mini bus - 3 unit Toyota Avanza - Sedangkan pengadaan 2 unit motor tidak direalisasikan dikarenakan efisiensi anggaran

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	34 unit	34 unit	100%	Mebel yang diadakan yaitu : - 1 unit kursi pejabat - 30 unit kursi rapat - 1 unit rak arsip - 2 unit filling cabinet
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	100%	Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan yaitu : - 1 unit AC Split - 1 Unit AC Standing - 1 unit Mesin Babat
6.4	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	100%	Bangunan lainnya yang diadakan yaitu : - 1 unit Parkiran kendaraan - 1 unit papan nama kantor
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah X 100%	100%	100%	100%	Terelisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendudukan kegiatan
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penyediaan jasa surat menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
		disediakan	disediakan				
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	100%	Tersusun laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100%	100%	100%	100%	Terelisasi sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan pendudukan kegiatan
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%	Kendaraan yang dipelihara yaitu : - 1 unit mobil - 3 unit motor
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	31 unit	100%	Peralatan dan mesin yang dipelihara yaitu - 1 unit mesin babat - 10 unit AC - 3 unit PC - 7 unit laptop - 10 unit printer
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	1 unit	1 unit	100%	Terpeliharanya 1 unit Gedung kantor

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
8.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor yaitu taman/halaman kantor

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 38,925,894,209,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 38,636.732.289,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 99.26 %.

Table 3.18
Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024

NO	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Operasi	37.128.294.209	36.931.743.289	94,88
	Belanja Pegawai	1.969.038.581	1.937.542.838	4,98
	Belanja Barang dan Jasa	4.505.953.108	4.345.917.717	11,16
	Belanja Hibah	30.653.302.520	30.648.282.734	78,73
2	Belanja Modal	1.797.600.000	1.704.989.000	4,38
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.797.600.000	1.704.989.000	4,38
Total		38,925,894,209	38,636.732.289	99,26

Tabel 3.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	4.657.692.679	4.657.692.679	4.477.112.894	96,12	180.579.785	3,88
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.859.003	58.859.003	54.793.550	93,09	4.065.453	6,91
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	36.692.300	36.692.300	34.326.300	93,55	2.366.000	6,45
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.017.400	5.017.400	4.511.000	89,91	506.400	10,09
3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	17.149.303	17.149.303	15.956.250	93,04	1.193.053	6,96
2.	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	1.999.260.181	1.999.260.181	1.967.748.988	98,42	31.511.193	1,58
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.907.958.581	1.907.958.581	1.878.262.838	98,44	29.695.743	1,56
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	91.301.600	91.301.600	89.486.150	98,01	1.815.450	2
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.619.900	1.619.900	1.499.400	92,56	120.500	7
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1.619.900	1.619.900	1.499.400	92,56	120.500	7
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.002.100	88.002.100	76.495.300	86,92	11.506.800	13,08
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.642.100	35.642.100	34.823.800	97,70	818.300	2,30
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	52.360.000	52.360.000	41.671.500	79,59	10.688.500	20,41
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.101.495	553.101.495	524.808.521	94,88	28.292.974	5,12
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.534.590	4.534.590	4.512.900	99,52	21.690	0,48
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000	62.000.000	34.000.000	54,84	28.000.000	45,16
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	12.231.905	12.231.905	12.227.371	99,96	4.534	0,04
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.014.750	18.014.750	18.006.300	99,95	8.450	0,05
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.040.000	8.040.000	7.840.000	97,51	200.000	2,49
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	11.495.000	11.495.000	11.436.700	99,49	58.300	0,51
7.	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	436.785.250	436.785.250	436.785.250	100,00	-	0,00
6.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.736.600.000	1.736.600.000	1.671.989.000	96,28	64.611.000	3,72

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1.566.440.000	1.566.440.000	1.505.700.000	96,12	60.740.000	3,88
2	Pengadaan Mebel	24.100.000	24.100.000	24.100.000	100,00	-	0
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	41.000.000	39.400.000	96,10	1.600.000	4
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.060.000	105.060.000	102.789.000	97,84	2.271.000	2
7.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	85.600.000	85.600.000	77.513.135	90,55	8.086.865	9,45
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	938.100	93,81	61.900	6,19
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.000.000	42.000.000	35.775.035	85,18	6.224.965	14,82
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	42.600.000	42.600.000	40.800.000	95,77	1.800.000	4,23
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	134.650.000	134.650.000	102.265.000	75,95	32.385.000	24,05
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	21.000.000	21.000.000	20.965.000	99,8	35.000	0,17
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18.650.000	18.650.000	18.525.000	99,33	125.000	0,67
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	82.000.000	82.000.000	49.775.000	60,70	32.225.000	39,30
4.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	-	0,00
02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.296.215.300	1.296.215.300	1.273.793.101	98,27	22.422.199	1,73
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.296.215.300	1.296.215.300	1.273.793.101	98,27	22.422.199	1,73
1.	Pelaksanaan koordinasi di bidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	22.880.900	22.880.900	13.852.100	60,54	9.028.800	39,46
2	Pembentukan Paskibraka	1.273.334.400	1.273.334.400	1.259.941.001	98,95	13.393.399	1,05
03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	30.816.266.720	30.816.266.720	30.794.012.219	99,93	22.254.501	0,07

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Perumusan Kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	30.816.266.720	30.816.266.720	30.789.002.434	99,91	27.264.286	0,09
1.	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	232.327.000	232.327.000	210.678.500	90,68	21.648.500	9,32
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	30.508.154.520	30.508.154.520	30.502.612.234	99,98	5.542.286	0,02
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	75.785.200	75.785.200	75.711.700	99,90	73.500	0,10
04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	58.395.600	58.395.600	53.924.300	92,34	4.471.300	7,66
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	58.395.600	58.395.600	53.924.300	92,34	4.471.300	7,66
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	58.395.600	58.395.600	53.924.300	92,34	4.471.300	7,66
05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	589.977.460	589.977.460	546.234.560	92,59	43.742.900	7,41
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	589.977.460	589.977.460	546.234.560	92,59	43.742.900	7,41
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	589.977.460	589.977.460	546.234.560	92,59	43.742.900	7,41

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1.507.346.450	1.507.346.450	1.496.665.000	99,29	10.681.450	0,71
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1.507.346.450	1.507.346.450	1.496.665.000	99,29	10.681.450	0,71
1.	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1.470.989.750	1.470.989.750	1.461.537.600	99,36	9.452.150	0,64
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	36.356.700	36.356.700	35.127.400	96,62	1.229.300	3,38
TOTAL BELANJA		38.925.894.209	38.925.894.209	38.636.732.289	99,26	289.161.920	0,74

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan RENSTRA tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indikator kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis OPD, mencapai dan bahkan melampaui dari target yang ditetapkan;
2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan tahun 2024 sebesar Rp. 38.636.732.289,- atau

99,26%. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 0,74% atau secara absolute sebesar Rp. 289.161.920,-

4.2. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
4. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.